BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas yang tinggi, serta pengawasan yang efektif merupakan faktor-faktor krusial yang menentukan kualitas kinerja pegawai pengelola keuangan daerah.

Peningkatan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara tertib, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan sistem keuangan daerah yang terintegrasi serta kurangnya pemahaman terhadap akuntabilitas dan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kinerja pegawai pengelola keuangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memenuhi ıtuhannya dalam kegiatan oprasionalnya selalu berusaha untuk capai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

beberapa faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan adalah masalah Kinerja Keuangan Daerah. Yang dimaksud kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendapatkannya.

Menurut Onibala et al (2021), mengatakan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Rosida (2024) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas -batas yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

Menurut Abriano et al (2025), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Vidyasari & Suryono (2021), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan atan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, poran, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Manengkey (2023), ssstem pengelolaan keuangan adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator, Tertib, Taat, Efektif, Efisiensi Ekonomis, Manfaat.

Madini (2025) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah atau Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang Serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan Milik daerah Berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) bertugas dalam mengelola keuangan daerah dari perencanaan, pengaggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan dan manajemen aset daerah.

Pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, itungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin ah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

Nalle, F. W., Oki, K. K., dkk. (2021), mengungkapkan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat jangan menjadi prioritas, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih basar.

Berdasarkan penelusuran penulis sampai saat ini belum ada yang menguji hubungan ini secara empiris. Mardiasmo (2006), memberikan definisi yang jelas mengenai akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan sanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik,

Hidayat, P., Sutikno, B., dkk (2025) memberi penjelasan mengenai pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Meskipun telah diterapkan berbagai sistem pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan pengawasan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat integrasi dan kemudahan akses sistem informasi keuangan, sehingga proses pengelolaan anggaran menjadi kurang efisien dan kurang transparan. Banyak pegawai pengelola keuangan yang menghadapi kendala teknis maupun sumber daya dalam mengoperasikan sistem yang ada, yang berdampak pada penurunan kinerja mereka.

Pada aspek akuntabilitas, sering kali ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Pemeriksaan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga potensi penyimpangan dan kesalahan pengelolaan masih cukup tinggi. Hal ini juga diperparah oleh kurangnya kesadaran dan haman pegawai terhadap pentingnya integritas dan sionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun aparat pengawas internal lainnya belum selalu optimal dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Kurangnya sumber daya dan kapasitas pemeriksa dalam bidang pengelolaan keuangan juga menjadi kendala yang memperlemah fungsi pengawasan. Akibatnya, kinerja pegawai pengelola keuangan daerah belum mampu mencapai potensi maksimal yang diharapkan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap signifikan antara harapan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang ideal dengan kondisi realitas di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebab gap tersebut dan menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kinerja pegawai pengelola keuangan daerah secara menyeluruh

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas sistem pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini dengan memilih judul: Pengaruh Sistem Pengelolaan keuangan, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten [illegible]auan Selayar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fakta di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1) Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?
2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?
3) Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1) Untuk menganalisis pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3) Untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem ıngan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Kegunaan Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti lebih mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

b. Kegunaan Praktis.

Manfaat praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga kepada para pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat sebagai wujud pencapaian tujuan otonomi daerah.

c. Kegunaan Teoritis

Teoritis yakni hasil penelitian ini dapat menemukan teori – teori baru yang diharapkan mampu menjadi solusi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan yang bersih. Bagi pejabat pengelola keuangan daerah dapat diperoleh informasi yang penting terkait dengan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan pengawasan keuangan Kabupaten kepulauan Selayar.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan alah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas m penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang sistem

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelolaan keuangan, daerah, akuntabilitas, pengawasan keuangan dan kinerja keuangan daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Stewardship Theory

Theory stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Welang, 2024).

Pada *Stewardship Theory*, model of man ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro *organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku f disejajarkan dengan kepentingan prinsipal dimana para *steward*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Mengacu pada Manuputty, G. P., dkk. (2025). adalah kolektif, sebab steward berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan principal termasuk *outside owner* (melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk *deviden* dan *share prices*), hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh *steward*. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. *Steward* melindungi dan memaksimumkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan, oleh karena i *utilitas ste*ward dimaksimalkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa steward memiliki kebutuhan untuk survive. Jelasnya, steward harus memiliki penghasilan untuk tetap hidup. Perbedaan antara agen dan prinsipal adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat bertemu. Steward mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan steward dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan steward, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

Menurut Ikhsan (2008:86) stewardship adalah pengelola meluruskan

esuai dengan tujuan pemilik. Pengelola akan berprilaku sesuai

atan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan antara

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepentingan dua pihak tersebut, Steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, karena Steward merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena Steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Namun demikian tidak berarti Steward tidak mempunyai kebutuhan hidup. Untuk mempraktikkan pendekatan ini, kunci utama terletak pada prinsipil, apakah prinsipil benar-benar dapat meyakini dan mempercayai steward yang di pilihnya dalam membangun kemitraan organisasi tersebut.

2.1.2. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya transparan kepada masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung-jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Manuputty, G. dkk (2025). akuntabilitas adalah instrument pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Merchilia, S., dkk (2024). definisi akuntabilitas tidak hanya itu, ilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi emerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif

Optimized using
trial version
www.balesio.com

parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Menurut Ardelia, S. N., dkk (2025). bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial dan program.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban aparatur pekon sebagai tim pelaksana pengelola ADP yang berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Menurut Samekto, A., Apriyanto, A., dkk. (2025). akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala pemerintah, tidak hanya sebatas menyediakan laporan kinerja ransparan namun perlu mempertimbangkan aspek nilai di dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat seperti yang dikemukakan Sugianti, D. N., dkk (2025). bahwa akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Akuntabilitas juga mengandung pengertian sebagai pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan, memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna mewujudkan Kinerja Keuangan Daerah. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih luas dari lingkup tanggungjawab keluar pemerintah saja. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan

yarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Menurut Samekto, A., dkk (2025), mengatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencangkup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati dent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Lidya, L. (2024), mengatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja. Selain keuangan, akuntabilitas juga terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1) Akuntabilitas fiskal, yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi;
2) Akuntabilitas undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah;
3) Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan
4) Akuntabilitas hasil, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
5) Akuntabilitas kejujuran, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)
6) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas setiap kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

erikut adalah lima indikator akuntabilitas pada pegawai pengelola n daerah, termasuk tambahan indikator kelima:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pegawai pengelola keuangan daerah harus menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara legal dan sah.
2) Transparansi dalam Pelaporan Keuangan. Keterbukaan dalam pelaporan sangat penting agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan memahami informasi keuangan daerah. Hal ini mencakup penyusunan laporan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), guna mencegah potensi penyalahgunaan.
3) Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran. Pegawai harus mampu mengelola anggaran secara hemat (efisien) dan menghasilkan manfaat maksimal (efektif). Ini mencerminkan kemampuan mereka dalam merancang dan mengeksekusi anggaran yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan.
4) Tanggung Jawab atas Hasil Kinerja Keuangan. Pegawai bertanggung jawab terhadap capaian kerja dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk realisasi anggaran dan hasil yang dicapai dari program/kegiatan yang didanai oleh APBD.
5) Integritas dan Profesionalisme dalam Tugas. Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari sikap dan etika kerja pegawai. Integritas tinggi, kejujuran, dan komitmen profesional menunjukkan bahwa tugas dijalankan demi kepentingan publik, bukan keuntungan pribadi atau kelompok

2.1.3. Pengawasan Keuangan

Dalam era pembangunan dewasa ini, pemerintah orde baru dari
l hingga saat ini, masalah pembangunan disegala bidang terus
at. Oleh sebab itu peranan pengawasan harus ditingkatkan pula,
penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyalahgunaan kekuasaan / jabatan yang langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara/daerah dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian pentingnya arti pengawasan dan pemeriksaan sehingga para ahli manajemen selalu mencantumkan fungsi pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, Adapun unsur yang terkandung dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengontrolan. Tetapi ada juga pembagian yang lain, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

beritahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindak lanjuti oleh
.n Pengawas Internal.
bentuk panitia khusus untuk mencari informasi yang lebih akurat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Fatimah, S. (2024), berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu: (1). Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2). Pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh baik atasan langsung dan aparat pengawas fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),

Inspektorat Jendral Departemen (Irjen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, Inspektorat Wilayah (Itwil), serta Satuan Pengawas Intern (SPI) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau

n perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan
al adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat
al baik yang berasal dari lingkungan internal depertemen, lembaga

Optimized using
trial version
www.balesio.com

negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Menurut Mardiasmo (2018: 35) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pengawasan anggaran berkaitan dengan azas akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegaitan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*eksternal control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan akountable apabila dinilai

bjektif oleh masyarakat luas.

enurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010

pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2011 : Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuh-nya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien"

Adapun dimensi pengawasan keuangan daerah menurut Siswanto (2009:149) yaitu :

1) Akurat (*Accurate*)
2) Tepat waktu (*Timely*)
3) Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)
4) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)
5) Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
6) Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)
7) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)
8) Fleksibel (*Flexible*)
9) Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
10) Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Indikator pengawasan keuangan yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai aturan:

1) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur. Pengawasan keuangan menilai sejauh mana kegiatan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan prosedur asional standar. Ketidakpatuhan terhadap aturan menjadi indikator a adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI yang baik membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Indikator ini mencakup keberadaan dan fungsi audit internal, pemisahan tugas, dan sistem pelaporan yang memadai.
3) Transparansi dan Akses Informasi Keuangan. Informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses publik menunjukkan pengawasan yang kuat. Indikator ini mencakup keterbukaan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan publikasi laporan keuangan secara berkala.
4) Tindak Lanjut atas Temuan Audit. Kemampuan pemerintah daerah atau unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari BPK atau inspektorat daerah menjadi ukuran penting dalam efektivitas pengawasan keuangan. Penundaan atau pengabaian tindak lanjut menunjukkan lemahnya pengawasan.
5) Partisipasi dan Pengawasan Publik. Keterlibatan masyarakat, LSM, dan DPRD dalam memantau penggunaan anggaran daerah menjadi indikator penting. Semakin tinggi partisipasi dan pengawasan eksternal, semakin kuat sistem pengawasan keuangan secara keseluruhan

2.1.4. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh proses dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mencatat, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini menjadi landasan utama dalam tata kelola keuangan publik di tingkat daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan utama dari sistem pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menjamin bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung gunan dan pelayanan publik. Dengan sistem ini, pemerintah daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi lima siklus utama seperti perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan Anggaran. Tahap ini mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Keterlibatan seluruh perangkat daerah dan sinkronisasi dengan kebijakan pusat sangat penting di tahap ini.
2) Penganggaran. Proses ini menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan melalui Peraturan Daerah. Penganggaran harus disusun secara sistematis, partisipatif, dan berbasis kinerja.
3) Pelaksanaan Anggaran. Setelah APBD disahkan, kegiatan dan belanja mulai direalisasikan. Tahap ini melibatkan proses administrasi keuangan, pencairan dana, dan realisasi program oleh masing-masing perangkat daerah sesuai pagu anggaran.
4) Penatausahaan Keuangan. Penatausahaan mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu, menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD/SIMDA). Ini penting agar laporan keuangan dapat disusun dengan baik.
5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Di akhir tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. LKPD ini diaudit oleh BPK dan menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Upaya untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, nformasi keuangan yang terintegrasi, dan sistem pengendalian yang efektif. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik juga

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menjadi bagian penting dari sistem ini, guna mendorong akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.

Berikut adalah lima indikator untuk mengukur variabel sistem pengelolaan keuangan daerah:

1) Ketersediaan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD). Indikator ini menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) atau SIPKD, yang membantu pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan secara elektronik dan real time.
2) Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Mengukur apakah perencanaan anggaran daerah sudah berbasis kinerja, dengan indikator seperti adanya indikator output dan outcome yang jelas, keterpaduan antara RKPD dan APBD, serta kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran.
3) Ketepatan Waktu dalam Penyusunan dan Penetapan Dokumen Keuangan Daerah. Ini mencerminkan disiplin dalam siklus pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), APBD, dan laporan keuangan. Ketepatan waktu menunjukkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Tiap SKPD. Indikator ini mengevaluasi keberadaan dan efektivitas pengawasan internal, seperti audit internal, pemisahan fungsi, dan sistem pengawasan yang berfungsi dengan baik dalam mencegah penyimpangan.
5) Tingkat Kepatuhan terhadap Hasil Audit dan Rekomendasi Pengawasan nal. Mengukur sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti n atau rekomendasi dari BPK, Inspektorat, maupun lembaga

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengawasan lainnya. Kepatuhan ini mencerminkan tanggung jawab dalam menata dan memperbaiki pengelolaan keuangan.

2.1.5. Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan kepala satuan kerja dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menujukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menujukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan akan memberi manfaat untuk memonitor perkembangan keadaan keuangan yang ada di pemerintah daerah.

Kinerja pegawai pengelolaan keuangan daerah merupakan gambaran tentang tingkat keberhasilan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana pegawai mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan anggaran daerah.

Pegawai pengelola keuangan memiliki peran strategis dalam menyusun, melaksanakan, mencatat, dan melaporkan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja mereka tidak hanya diukur dari aspek administratif, ga dari kualitas hasil kerja seperti akurasi laporan keuangan, n waktu dalam penyusunan dokumen anggaran, serta kemampuan emastikan belanja daerah tepat sasaran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penilaian kinerja pegawai pengelolaan keuangan umumnya mengacu pada beberapa indikator, seperti kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kejelasan dan akurasi laporan keuangan. Selain itu, aspek integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem keuangan (misalnya penggunaan aplikasi keuangan digital) juga menjadi tolok ukur penting.

Kinerja yang baik dari pegawai pengelolaan keuangan daerah akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kinerja mereka. Hasibuan (2013) dalam Novriansyah et al., (2019) menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja dapat dijadikan sebagai hal penting untuk seluruh jenis organisasi baik organisasi dari pemerintahan maupun non pemerintahan sebab kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai akan dapat memberi efektivitas pada suatu organisasi. Kinerja juga akan menjadi penting sebab kinerja akan mampu mencerminkan ukuran dari keberhasilan unsur pimpinan dalam mengelola organisasi dan Sumber Daya Manusia yang ada pada suatu organisasi Azas et al., (2019). Pengembangan kinerja dipandang sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan segala sesuatu yang dimiliki agar bertambah menjadi lebih baik atau lebih besar sebelumnya. Pengembangan sumber daya manusia berarti segala upaya untuk meningkatkan agar potensi sumber daya manusia tersebut menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih berkualitas Barus (2018).

inerja pegawai juga dapat dijadikan sebagai pencapaian serta hasil aksanaan serangkaian tugas Hardiyono et al., (2017). Seorang berkinerja baik ketika mampu menyelesaikan pekerjaan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sama atau melebihi standar atau kriteria yang telah ditetapkan bersama dalam organisasi. Organisasi yang sukses dan efektif adalah organisasi dengan individu yang memiliki kinerja baik.

Dalam suatu organisasi, pegawai dengan kinerja yang baik dapat menjadikan organisasi tersebut mencapai efektivitas dan keberhasilan. Tujuannya adalah untuk memberikan bahkan sebagai upaya peningkatan produktivitas organisasi. Kinerja pegawai merupakan aspek yang penting dalam manajemen sumber daya manusia Sari et al., (2016).

Mutu kerja karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, mengukur dan meningkatkan kinerja, yang dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tolak ukur kinerja. Ada beberapa sayarat tolak ukur kinerja yang baik, yaitu:

1) Tolak ukur yang baik, haruslah mampu dikukur dengan cara yang dapat dipercaya.
2) Tolak ukur yang baik, harus mampu membedakan individu- individu sesuai dengan kinerja mereka.
3) Tolak ukur yang baik, harus sensitif terhadap masukan dan tindakantindakan dari pemegang jabatan.
4) Tolak ukur yang baik, harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, beberapa di antaranya yaitu Malthis & Jackson (2006):

1) Kemampuan mereka
2) Motivasi
3) Dukungan yang diterima
4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5) Hubungan mereka dengan organisasi

this & Jackson (2009: 378) dalam Handayani & Bachri (2014) .kan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau ıkukan para pegawai/karyawan. Berikut adalah lima indikator untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

variabel kinerja pegawai pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan dalam analisis atau instrumen penelitian:

1) Ketepatan Waktu dalam Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Keuangan. Mengukur kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas keuangan seperti laporan realisasi anggaran, pertanggungjawaban belanja, dan laporan keuangan lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2) Kualitas dan Akurasi Hasil Pekerjaan Keuangan. Menilai sejauh mana laporan dan dokumen yang disusun oleh pegawai bebas dari kesalahan administratif, logika anggaran, atau ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Ini mencerminkan ketelitian dan kompetensi teknis.
3) Pemahaman terhadap Peraturan dan Sistem Keuangan Daerah. Menggambarkan tingkat penguasaan pegawai terhadap regulasi keuangan daerah, termasuk peraturan menteri, perundang-undangan, serta penggunaan aplikasi keuangan seperti SIPD atau SIMDA.
4) Kemampuan Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait. Menilai sejauh mana pegawai dapat bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan SKPD lain, bendahara, atau pihak eksternal dalam proses pengelolaan keuangan, seperti penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban belanja.
5) Tingkat Inisiatif dan Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Tugas Indikator ini mencerminkan etos kerja, kedisiplinan, serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa menunggu perintah atasan, termasuk dalam situasi mendesak atau saat terjadi kendala teknis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sugiantari (2023)	Pengaruh Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar	Penelitian ini menemukan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lembaga tersebut. Pegawai yang disiplin lebih cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka dapat mematuhi aturan dan menjalankan tanggung jawab dengan konsisten.
2	Hafidz (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada	Hasil penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Binjai menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	
3	Dewi et al., (2024)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo	Penelitian ini menemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara bersama-sama dan parsial berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah di BPKAD Kota Palopo.
4	Helmi Prila Aldino (2021)	Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Studi ini menemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			pengelola keuangan di instansi pemerintah.
5	Mau et al (2025)	Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)	Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan, dan transparansi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6	Molle et al., (2024)	Pengaruh Dimensi Budaya Nasional Hofstede terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kota Kupang	Dimensi budaya nasional Hofstede, seperti power distance, individualisme, masculinity, long-term orientation, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Kupang.
7	Fadillah et al (2024)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money,	Akuntabilitas keuangan daerah dan value for money berpengaruh positif terhadap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan kejujuran memberikan dampak negatif. Pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
8	Afrianto et al (2023)	Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi	Perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh perencanaan dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
9	Purba & Kusmilawaty (2024)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi	Penelitian ini menyoroti pentingnya sasaran anggaran yang jelas dan pengendalian akuntansi yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	
10	Angraini, R. Agusti (2016	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, sistem keuangan daerah yang baik, dan pengendalian yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com